TL1331

DARI MEMO KE TUTUALA:
SUATU KALEIDOSKOP PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI TIMOR TIMUR[1]

Oleh George J. Aditjondro[2]

SESUAI dengan permintaan Ketua Satuan Tugas Lingkungan Hidup Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) akhir bulan lalu, saya akan "membagi-bagi" (*sharing*) persoalan-persoalan lingkungan yang saya amati di Pulau Timor selama tgl. 28 Juni s/d 9 Juli lalu. Sebelumnya saya ingin mengajukan tiga catatan. Pertama, sesuai dengan derajat kepentingannya,[3] alokasi waktu di lapangan, serta keterbatasan waktu dan tenaga saya saat ini, makalah ini hanya akan berbicara tentang persoalan lingkungan yang saya amati di Timor Timur.

Kedua, yang saya fahami sebagai "persoalan lingkungan" tidak hanya terbatas pada persoalan terganggunya plasma nutfah dan sumber daya hayati non-manusiawi, tapi juga termasuk persoalan terganggunya kelestarian hidup manusia pribumi Timor Timur.

Ketiga, sebagaimana layaknya seorang peneliti dan ilmiawan, bahan refleksi saya terhadap permasalahan lingkungan di Pulau Timor ini tak akan saya batasi pada pengamatan lapangan selama berada di pulau itu, tapi juga saya lengkapi dengan studi kepustakaan terhadap literatur tentang pulau itu yang saya kumpulkan di Indonesia, di Timor Timur,[4] di AS selama masa studi saya (1981-1982, 1987-1989, 1991-1992), dan

---

1) Makalah pengantar diskusi lingkungan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Lingkungan LPM-UKSW di kampus UKSW, 6 Agustus 1993.

2) Staf pengajar matakuliah Dampak Lingkungan dan Gerakan-Gerakan Sosial pada Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW. Memperoleh gelar M.S. (1989) dan Ph.D. (1992) dari Cornell University, AS, di bidang pendidikan orang dewasa, perbandingan politik Asia Tenggara, dan sosiologi pedesaan.

3) Timor Timur telah diliputi suatu "*manto de silencio*", suatu "tabir rahasia" oleh pemerintah Indonesia dari awal Desember 1975 s/d Desember 1988, ketika suatu politik "*abertura*", "keterbukaan" mulai dijalankan. Bahkan sampai saat ini, masih ada obyek-obyek tertentu yang tak boleh direkam secara fotografis oleh warganegara Indonesia sendiri, suatu pertanda kelainan daerah ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang juga diklaim sebagai propinsi NKRI. Itu sebabnya, saya berpendapat bahwa kaum demokrat Indonesia perlu melakukan tugas ekstra untuk mengungkap tabir kerahasiaan itu.

4) Satu: berdasarkan klaim historis Indonesia terhadap bekas wilayah jajahan Hindia Belanda saja; dua: berdasarkan pengetahuan bahwa apa yang disebut "Deklarasi Balibo" untuk berintegrasi ke Indonesia hanya disusun oleh lima orang politisi Timor Timor di sebuah hotel di Bali, atas desakan petugas-petugas Opsus untuk disampaikan kepada almarhum Menlu Adam Malik di Atambua (Timor Indonesia), sebagai reaksi terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Demokrasi Timor Timur di hadapan rakyat Timor Timur di Dili, pada tanggal 28 November 1975; tiga: berdasarkan kenyataan bahwa keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Timor Timur yang sekali lagi menegaskan keinginan bergabung dengan Indonesia hanya dihadiri oleh 7 dari 35 orang *fitusi* di Timor Timur; empat: berdasarkan kenyataan bahwa hukum internasional belum mengakui Timor Timur sebagai bagian yang syah dari Republik Indonesia; lima: berdasarkan tugas konstitusional seluruh warganegara Indonesia untuk mendukung kemerdekaan sebagai hak segala bangsa (alinea pertama Pembukaan UUD 1945); enam: berdasarkan kenyataan bahwa gerakan kemerdekaan di Timor Timur sampai saat ini belum tumpas, bahkan semakin mengalami re-

di Lisboa, Portugal, selama mengikuti Simposium ke-V tentang Timor Timur yang diselenggarakan oleh Universitas Oporto, 22-29 Juli lalu.

Menurut hemat saya, ada lima permasalahan lingkungan utama yang "menghinggapi" bumi Loro Sae. Pertama, dampak ekologis akibat perang yang telah dilancarkan selama 18 tahun untuk menumpas gerakan kemerdekaan di sana. Kedua, dampak pemilikan tanah luas oleh pemilik/penguasa tanah guntai lama maupun baru. Ketiga, dampak program transmigrasi resmi serta arus migrasi spontan dari Indonesia setelah era perang terbuka. Keempat, dampak program desa binaan serta pembangunan rumah-rumah oleh batalyon-batalyon teritorial (BTT) di Timor Timur. Kelima, dampak potensial rencana eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Celah Timor. Berikut ini saya akan menyoroti secara singkat kelima permasalahan lingkungan tersebut.

***

SEPERTI yang sama-sama kita ketahui, versi resmi yang (harus) disiarkan oleh media massa Indonesia sejak Oktober 1975 adalah bahwa hanyalah sukarelawan sipil Indonesia semata-mata yang dimintai bantuannya oleh kelompok-kelompok anti-komunis di Timor Timur untuk membebaskan koloni Portugis itu dari dominasi Fretilin yang digambarkan sebagai kelompok ekstremis komunis yang didukung oleh oknum-oknum tentara kolonial Portugis. Untunglah, kenyataan yang sesungguhnya sedikit banyak kini mulai terungkap ke hadapan publik di Indonesia. Misalnya, majalah *Tempo* edisi 5 Desember 1992 memuat sebuah foto dokumenter di halaman 28 yang diberi *caption* (judul) "Pasukan ABRI ketika mendarat di Tim-Tim (1975)".[5]

Selain itu, majalah *Angkasa* edisi Januari 1993 memuat laporan dengan foto berwarna di halaman 39 s/d 42 yang menggambarkan bagaimana Indonesia membeli 16 pesawat *counter - insurgency* tipe OV-10F Bronco dari AS untuk menumpas gerakan pembebasan Fretilin selama tiga tahun (1976 s/d 1979). Laporan itu menyebutkan bahwa pesawat itu punya kapasitas mengangkut berbagai jenis amunisi, termasuk bom napalm (Bet, 1993). Itu sudah merupakan suatu indikator, bahwa laporan berba-

---

generasi; dan tujuh: berdasarkan kenyataan bahwa suatu referendum berdasarkan prinsip-prinsip internasional belum pernah dijalankan di Timor Timur, di mana keinginan mayoritas rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia dapat dikonfirmasi, maka saya tetap menganggap "Timor Timur" suatu entitas politik yang tidak termasuk dalam entitas politik "Indonesia".

5) Sebagai orang yang pernah menulis dan menyunting laporan-laporan tentang Timor Timur di majalah *Tempo*, saya dapat menunjuk kekeliruan *caption* foto, yang menurut kredit fotonya dibuat oleh wartawan *Tempo* sendiri. Sesungguhnya, foto hasil jepretan (mantan) wartawan *Tempo* Sjahrir Wahab itu menggambarkan pendaratan pasukan Indonesia di Atapupu di Timor Barat (Indonesia), menjelang invasi ke Timor Timur. Semua pasukan yang didaratkan dengan kapal jenis LST itu telah dicopot tanda pangkat dan lambang kesatuannya, untuk mendukung skenario resmi bahwa mereka adalah sukarelawan sipil yang diterjunkan untuk membantu front anti-komunis Timor Timur. Baik penyerbuan ke Dili pada tanggal 7 Desember 1975, maupun penyerbuan sebelumnya ke kota-kota Timor Timur dekat perbatasan Timor Barat, seperti Balibo, Maliana dan Bobonaro, tertutup bagi semua wartawan Indonesia, termasuk wartawan *Tempo*. Jadi mustahil *Tempo* memiliki foto pendaratan di Timor Timur karya wartawan majalah itu sendiri.

gai media massa dan pengamat di luar negeri tentang penggunaan bom napalm di Timor Timur (lihat Taylor, 1991: 204), barangkali ada benarnya.

Memang, tanpa saya tanyai secara khusus, dua orang sumber yang saya wawancarai di Timor Timur menggambarkan adanya penggunaan sejenis "bom" yang panasnya membuat kaca-kaca dan gelas-gelas di biara meleleh, dan membakar daging manusia. Kalau begitu, penggunaan herbisida sebagai senjata penghancur tetumbuhan atau *defoliant* semacam *Agent Orange* di Vietnam (Weisberg, 1970; Galstone, 1971; Wilcox, 1989), boleh jadi juga terjadi di Timor Timur, seperti yang dinyatakan oleh sejumlah pengamat di luar negeri (Human Rights, 1977: 63; Taylor, 1991: 85). Hal itu juga dikonfirmasi oleh seorang peserta Simposium Timor Timur ke-V yang diselenggarakan oleh Universitas Oporto di Lisboa, baru-baru ini.

Dalam kunjungan saya ke Timor Timur baru-baru ini, saya juga menyaksikan satu "saksi bisu" dari kehebatan perang di bulan Desember 1975 itu, yakni bekas kompleks Seminari "Bunda Kami dari Fatima" (*Nossa Senhora de Fatima*), yang sebagian besar hancur karena tembakan dari laut dan darat pada tanggal 13 Desember 1975. Perusakan seminari itu sudah dilaporkan tahun 1979 oleh seorang pastor Jesuit Indonesia, Alex Dirdja, dalam buletin intern ordonya, *Inter-Nos*.

Dampak ekologis akibat perang itu dapat dibedakan antara dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung adalah jatuhnya korban jiwa manusia, baik dari sisi Indonesia, tapi terlebih-lebih lagi dari fihak rakyat Timor Timor. Sejak Desember 1975 s/d Agustus 1976, sekitar 500 orang tentara Indonesia telah mati terbunuh dan 2.000 orang lainnya luka parah. Sementara itu, jumlah korban dari fihak rakyat Timor Timur jauh lebih tinggi lagi. Menurut seorang ahli ilmu politik AS, J. William Liddle, ada 60 ribu orang pria, perempuan, dan anak-anak, atau sekitar 10% dari seluruh penduduk Timor Timur, yang telah meninggal dunia dalam baku tembak maupun akibat deprivasi karena perang, dalam dua bulan pertama pertempuran sengit itu (1992: 22).

Korban jiwa rakyat Timor Timur dengan cepat menanjak dalam tahun-tahun berikutnya. Selama tiga tahun perang, jumlah penduduk daerah itu menyusut dari 688.771 orang (1974) menjadi 329.271 orang (Oktober 1978). Ke mana 359.500 orang yang lain? Yang mengungsi ke Portugal dan Australia sekitar tahun 1975 - 1976, kira-kira 4.000 orang. Lalu ada juga sejumlah besar penduduk yang dipaksa atau sukarela masuk hutan atau naik ke gunung bersama Fretilin, sehingga tentunya tak dapat dicacah oleh tentara Indonesia.

Tapi terlepas dari kesulitan-kesulitan cacah jiwa, laporan-laporan mikro memang menunjukkan jumlah korban jiwa yang luar biasa. Misalnya, menurut Alex Dirdja, pastor Jesuit Indonesia yang bertugas di Timor Timur selama bulan Maret 1979, desa Maubisse di Kabupaten Ainaro yang pernah berpenduduk 9.607 orang sejak 1976 telah kehilangan 5.021 orang penduduk. Sang pastor itu sendiri ada kalanya harus ikut mengubur empat jenazah dalam sehari (1979: 23).

Tabel 1. Perkembangan Populasi Ternak di Timor Timur, 1976-1987

Jenis ternak	Jumlah ekor ternak			
	1976	1980	1985	1987
Sapi	70.200	30.700	49.800	53.593
Kerbau	90.600	24.600	35.200	36.548
Kuda	95.400	15.500	23.400	23.890
Kambing	188.200	26.400	73.900	79.053
Domba	27.700	11.200	27.500	28.309
Babi	121.900	64.000	190.400	204.062
Ayam	724.500	218.800	417.900	453.204
Bebek	31.500	18.100	29.400	30.408

Sumber: Soesastro, 1991: 212; *Hidup*, 27 November 1988: 9.

Tabel 2: Perkembangan Ekspor Kopi dari Timor Timur, 1973-1988

Tahun	Jumlah Ekspor (Ton)
1973	5,584
1978	1,329
1979	2,510
1980	5,597
1981	3,547
1982	2,968
1983	4,600
1984	2,995
1985	3,195
1988	6,000

Sumber: Soesastro, 1991: 224.

Dampak langsung lainnya adalah berkurangnya produksi padi, populasi ternak, kopi, dan sejumlah sumber daya alam lainnya. Produksi tanaman pertanian secara total merosot dari 42.100 ton di tahun 1973 menjadi 12.600 ton di tahun 1976. Produksi padi khususnya, merosot selama periode itu dari 25.200 ton menjadi 8.000 ton (Soesastro, 1991: 210). Sesudah perang terbuka selama tiga tahun, di seluruh Timor Timur jumlah ternak merosot secara drastis (lihat Tabel 1). Sementara itu, produksi dan ekspor kopi yang merupakan tanaman perdagangan Timor Timur yang utama, juga merosot drastis (lihat Tabel 2).[6]

[6]) Kemerosotan produksi kopi di Timor Timur itumemang tidak hanya disebabkan oleh rusaknya perkebunan kopi akibat perang, melainkan juga karena faktor-faktor lain. Yakni: tenaga pekerja perkebunan

Sementara itu, dampak tidak langsung akibat perang di Timor Timur ada bermacam-macam. Namun yang terpenting adalah semakin menguatnya budaya kekerasan di daerah itu. Budaya kekerasan ini, yang mencapai titik kulminasi paling aktual dalam pembantaian 271 orang pemuda di pekuburan Santa Cruz, Dili, pada tanggal 12 November 1991, telah menumbuh-suburkan suatu "kebudayaan intel" di Timor Timur. Maksud istilah itu adalah munculnya suatu kebiasaan buruk di antara sebagian orang Timor Timur untuk menjadi *spy* terhadap sesama mereka, sambil berusaha menyelesaikan konflik-konflik di antara mereka sendiri dengan jalan membuat laporan -- yang kadang-kadang palsu -- tenang gerak-gerik saingan mereka kepada aparat keamanan di Timor Timur (Neonbasu, 1992: 36, 38).[7]

Budaya kekerasan ini, atau barangkali lebih tepat, budaya intimidasi, telah melahirkan suatu kosakata tersendiri di Timor Timur. Misalnya, para pelapor di kalangan pribumi Timor Timur itu dijuluki *bufo* (warisan zaman polisi rahasia Portugis, PIDE) atau *Mau'hu* (istilah yang baru berkembang di era kekuasaan Indonesia). Sementara itu, untuk mengancam penduduk yang melawan pemerintah, berbagai istilah baru telah berkembang yang sangat ampuh dalam membangkitkan asosiasi akan cara-cara pembunuhan dan penyiksaan selama lima tahun pertama perang di Timor Timur, seperti "mandi laut" di Dili, "(jalan-jalan ke) Jakarta Baru", "piknik ke Builiko" di Ainaro, "menginap di Hotel Flamboyan" di Baucau, dan lain-lain.

Selain berdimensi linguistik, budaya kekerasan di Timor Timur juga punya dimensi *gender*, yang sayang sekali belum mendapat perhatian dari para aktivis pembela hak-hak perempuan di Indonesia. Seperti halnya tentara pendudukan di manamana, pelecehan seksual antara ribuan serdadu Indonesia di Timor Timur terhadap para perempuan pribumi tak dapat dielakkan. Sepintas lalu, saya mencatat dua jenis pola reaksi penduduk setempat terhadap tekanan seksual pada serdadu yang ditempatkan di sana. Ada yang mengalah saja terhadap kebutuhan seks para pendatang itu, dan dengan pasrah bersedia menjadi semacam "isteri piaraan" dari para lelaki bersenjata yang bertugas di kampung mereka.Tanpa bermaksud melecehkan, pola itu saya sebut "pola Viqueque", sesuai dengan nama tempat dari mana respons semacam itu dilaporkan.

---

kopi semakin langka; pembatasan kebebasan gerak para pemetik kopi yang dulu bebas bepergian dari satu daerah ke daerah lain mengikuti irama panen kopi; pengendalian terhadap harga kopi oleh penguasa baru di Timor Timur; dan adanya suatu masa di mana Organisasi Kopi Internasional, ICO (*International Coffee Organization*), yang menentukan kuota ekspor kopi negara-negara anggotanya, secara resmi tidak mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia, sehingga daerah ini tidak mendapat kuota ekspor kopi (Soesastro, 1991: 210-212, 223-227).

[7]) Contoh paling aktual dari laporan-laporan palsu semacam itu adalah banyaknya orang yang dipaksa mengikuti "sumpah darah" sebagai tanda pembubaran organisasi-organisasi klandestin di Kabupaten Ainaro dan Aileu, yang meliputi dari pelajar SMP s/d pegawai-pegawai negeri yang *nolahame* termasuk kader Golkar dan KNPI. Contoh yang sudah agak lama adalah penyiksaan dan kemudian pemenjaraan seorang mantri, Dominggus S., di berbagai penjara di Tim-Tim, Bali, dan akhirnya di penjara Cipinang, Jakarta, selama total 11 tahun, sesudah ia terlibat dalam pembelaan terhadap sejumlah keluarga yang akan digusur di kota Dili.

Sementara itu, ada pula perempuan setempat yang secara kompak dilindungi oleh seluruh persekutuan adat mereka. Setiap serdadu yang menaruh minat pada kaum hawa setempat harus lebih dahulu menjalani upacara adat (misalnya dengan membayar mas kawin yang ditentukan oleh keluarga calon mertua) serta menerima sakramen perkawinan di gereja sebelum dapat berkumpul dengan perempuan yang mereka taksir. Tentara yang menolak memenuhi ketentuan adat dan gereja itu, serta merta dilaporkan kepada atasan mereka di Dili, yang kadang-kadang mau juga menindak bawahan yang mempermainkan perempuan setempat. Terutama di sektor timur -- *ponta leste* (ujung paling timur = Kabupaten Lautem) dan *centro leste* (kawasan "timur tengah" = Manatuto dan Baucau) -- di mana kekuatan gerilyawan Falintil[8] masih diperhitungkan oleh fihak ABRI.[9] Jenis respons yang saya sebut "pola Lospalos" (karena saya dengar selama perjalanan dari Lospalos ke Tutuala) kadang-kadang berhasil mencegah tentara yang bertugas di sana memperlakukan para perempuan pribumi sekedar sebagai pemuas kebutuhan seks mereka.[10]

Kuatnya budaya kekerasan di Timor Timur ini sangat penting untuk digarisbawahi. Soalnya, masih ada anggapan sementara cendekiawan Indonesia -- termasuk sebagian staf akademik UKSW --, bahwa konflik-konflik pengelolaan sumber daya alam di Timor Timor dapat dengan mudah dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Lingkungan, atau ketentuan hukum sipil dan hukum militer Indonesia yang lain.

Dampak tidak langsung lain yang timbul karena perang di Timor Timur adalah pengurasan berbagai jenis sumber daya alam, khususnya ternak, oleh pasukan-pasukan yang dapat dengan mudah mengangkutnya lewat sarana transpor yang bebas dari pengawasan aparat-aparat pemerintahan sipil. Krisis ternak yang sangat terasa di tahun-tahun pertama setelah "integrasi", membawa berbagai dampak negatif berikutnya. Pertama, mengingat ternak, terutama kerbau dan sapi, merupakan tenaga pengo-

---

8) Media massa Indonesia sering secara salah kaprah masih melabel para gerilyawan sebagai Fretilin. Padahal, atas prakarsa Xanana Gusmao, sejak 1986, Tentara Pembebasan Timor Timur atau *Falintil* (*Forca Armada de Liberacao Timor Leste*), telah dilepaskan dari bawah hirarki Fretilin, dan diubah dari suatu lasykar partai politik menjadi suatu kesatuan tentara nasional yang langsung berada di bawah pimpinan tertinggi CNRM (*Conselho Nacional de Resistencia Maubere*), atau Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Maubere yang beranggotakan semua orang Timor Timur yang memperjuangkan kemerdekaan negeri itu.

9) Hari Rabu, 17 Maret 1993, orang-orang yang diidentifikasi sebagai "sisa-sisa GPK" oleh Puspen ABRI menembak mati dua orang anggota Menwa dan dua orang anggota ABRI di dekat kota Lospalos (*Kompas*, 19 Maret 1993). Yang tidak diberitakan oleh pers Indonesia adalah bahwa dua hari kemudian, enam orang anggota ABRI juga tewas tertembak di kawasan yang sama. Menurut sumber-sumber yang saya wawancarai di Lospalos, masih banyak kejadian-kejadian serupa selama semester pertama 1993.

10) Disoroti dari sudut psiko-analisa politik Frantz Fanon, pelampiasan nafsu seksual para serdadu tentara pendudukan terhadap kaum hawa di daerah yang mereka duduki, tidak hanya merupakan pemenuhan kebutuhan biologis, tapi juga merupakan usaha menegakkan rasa percaya diri para serdadu yang tergoncang oleh perlawanan penduduk setempat, khususnya pembalasan dendam mereka karena tidak berhasil mematahkan perlawanan para lelaki setempat. Lihat Fanon, 1967.

lah tanah sawah dengan sistim *renca* yang juga dikenal di Timor Barat, produktivitas sawah dengan sendirinya ikut merosot. Hanya di beberapa tempat di mana para petani sawah dapat menyewa tenaga traktor dengan murah dari lembaga-lembaga pengembangan swadaya masyarakat, seperti Yayasan Etadep di lembah Sungai Loes di perbatasan kabupaten Liquica, Ermera dan Bobonaro, serta STM Fatumaca di kabupaten Baucau, petani dapat mengolah sawahnya kembali dengan produktivitas yang semakin meningkat.

Di fihak lain, gangguan keamanan di Lembah Loes mengubah kebiasaan para petani membiarkan kawanan kerbau dan sapi mereka berkeliaran di dasar lembah, dan membawa ternak yang masih tersisa untuk dikandangkan di dekat kampung mereka di lereng-lereng gunung di sekitar lembah itu. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk membabat hutan guna menciptakan tempat merumput ternak milik setiap keluarga. Kebiasaan baru itu telah menambah erosi di perbukitan sekitar Lembah Loes (Metzner and Rumawas, 1991: 16-17).

Dampak tidak langsung berikutnya, yang sangat kentara di negara yang banyak kehilangan penduduk priyanya karena perang, seperti Kambodia, adalah memberatnya tugas kaum ibu sebagai kepala rumah tangga dan penjamin kebutuhan keluarga, sekaligus memberatnya tugas kaum ibu dan anak-anak sebagai aparat produksi di luar keluarga (Nysliweg, 1988: 10-13, 52-63.). Di Timor Timur, misalnya, anak-anak sekolah tak jarang ikut bekerja mengaspal jalan raya (Seran, 1989), suatu hal yang jarang kita lihat di Indonesia. Bahkan di tahun-tahun belakangan ini remaja-remaja Timor Timur sengaja di-putus-sekolah-kan (dengan bantuan Yayasan Tiara) untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik di Indonesia, termasuk di PT Kanindotex dekat Salatiga. Tindakan ini lebih merupakan usaha mematahkan semangat kemerdekaan yang sudah bersemi di hati sanubari kaum remaja di sana, ketimbang merupakan usaha memperbaiki pendidikan dan kesempatan kerja bagi mereka.

Dampak tak langsung lainnya yang paling tampak di Timor Timur adalah diskriminasi pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, dan pelabuhan, di daerah-daerah di mana konflik bersenjata masih sedang berkecamuk, misalnya di sektor timur (Baucau dan Lautem). Sementara itu, di daerah-daerah yang keadaannya relatif "aman", seperti dari perbatasan Ermera ke Maliana, dan dari perbatasan Maliana ke Suai, kondisi jalannya sangat buruk dan sungai-sungai umumnya harus dilewati tanpa jembatan (lihat Peta 1).

Akhirnya, ada dampak tidak langsung yang harus ikut dipikul oleh orang di luar Timor Timur, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia, masyarakat yang melintas di depan kompleks-kompleks satuan tentara yang baru pulang bertugas di Timor Timur, harus ikut memikul *stress* yang diderita anggota-anggota ABRI, berupa larangan melintas melebihi kecepatan tertentu. Secara tidak langsung, masyarakat luas juga ikut mensubsidi perang di Timor, dengan menanggung menjamurnya panti-panti asuhan berlabel "Seroja", yang menampung anak-anak prajurit yang gugur di Timor Timur (lihat misalnya, *Sinar Harapan*, 16 Juni 1985). Selain itu, anggaran Hankam yang diperlukan untuk menutup biaya perang di Timor Timur, ikut

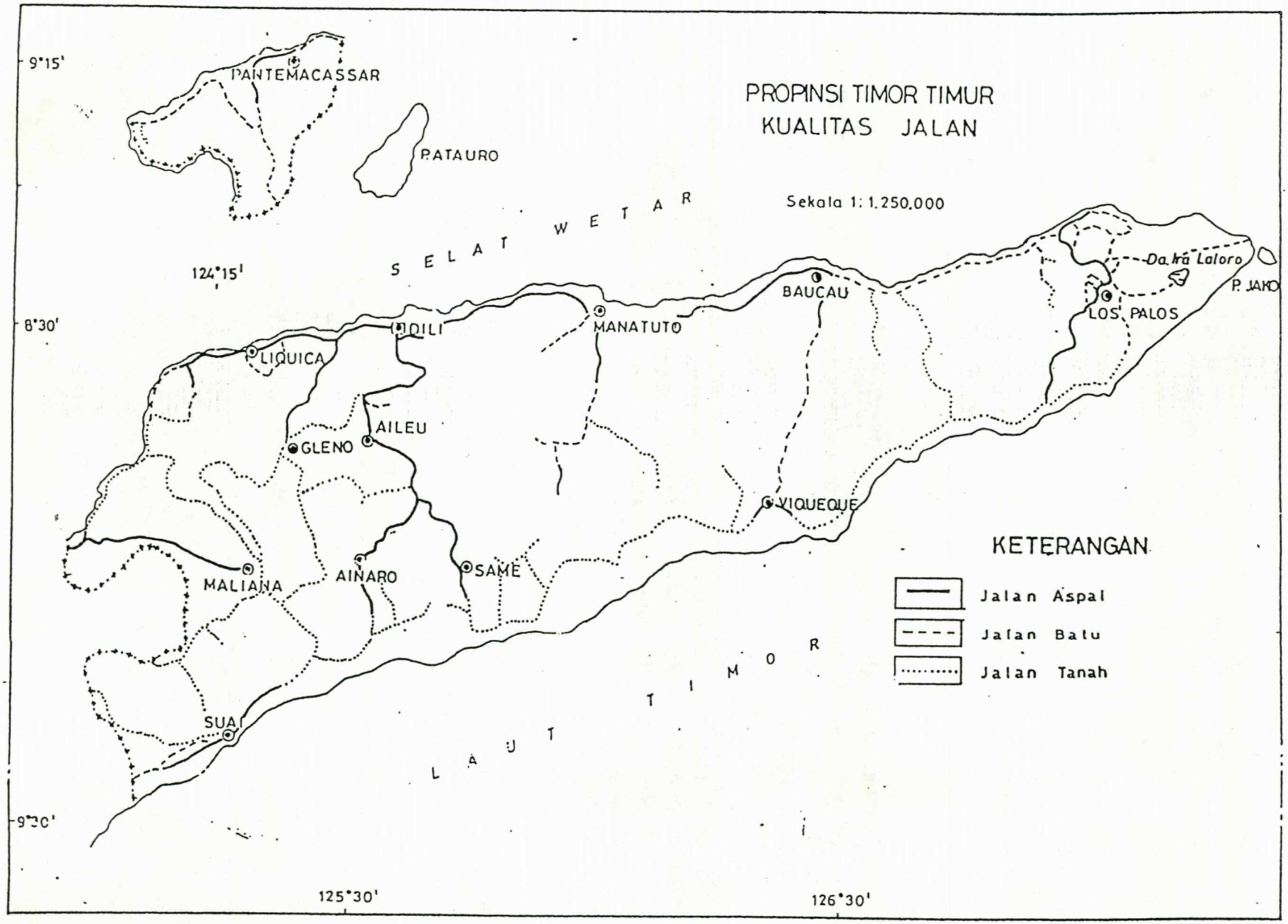

Peta 1: Kualitas Jalan di Timor Timur
(Sumber: Kanwil BPN Propinsi Timor Timur)

menghambat pertumbuhan porsi APBN untuk pendidikan dan kesehatan (lihat Kuntjoro-Jakti and Simatupang, 1990).

Sedangkan di luar negeri, negara-negara seperti Australia dan Portugal, harus bersedia menampung arus pengungsi Timor Timur yang total telah mencapai 5.000 orang. Hal itu membawa masalah-masalah lingkungan pemukiman tersendiri bagi negara-negara itu.

Begitulah sepintas lalu, berbagai dampak primer, sekunder, dan tersier, akibat perang yang telah berkecamuk -- mula-mula secara terbuka, lalu berubah menjadi apa yang lazim disebut "*low intensity conflict*" -- selama 18 tahun di Timor Timur. Pada saat dunia ilmu lingkungan sudah mulai menunjukkan perhatiannya pada dampak ekologis akibat perang, atau *ecocide*, di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah, sudah saatnya kalangan akademis Indonesia sendiri pun mulai lebih memperhatikan *ecocide* yang terjadi di "halaman belakang" kita: Timor Timur.

***

Masalah lingkungan berikutnya, yang lebih terbatas skala dan kaitannya, adalah pemilikan tanah-tanah luas oleh segelintir penduduk di Timor Timur. Seperti yang sering terjadi di daerah-daerah agraris lainnya, pola pemilikan tanah yang sangat timpang cenderung menguruskan penduduk setempat yang kebanyakan hanya bekerja sebagai buruh tani atau petani gurem lainnya, "mendorong" mayoritas petani yang miskin untuk menggarap lereng-lereng gunung yang masih merupakan "daerah tak bertuan", dan dengan demikian memacu erosi di daerah itu. Nah, bagaimana masalah lingkungan yang merupakan warisan zaman kolonial Portugis itu masih tetap bertahan di era pendudukan Indonesia?

Terlebih dahulu kita perlu mengenal pola pemilikan tanah di Timor Timur di zaman penjajahan Portugis. Di masa itu, tanah-tanah luas berada di tangan empat kelompok. Kelompok pertama adalah keluarga-keluarga *mestico* (campuran Portugis dan penduduk setempat) keturunan aktivis-aktivis politik yang dibuang dari Portugal ke koloni paling timur itu. Contohnya adalah *fazenda* (kebun luas) milik keluarga Carrascalao di perbatasan kabupaten Liquica dan Ermera. Dengan mendapatkan tanah luas secara luas di Timor Timur, radikalisme politis para *deportados* itu diharapkan dapat diluntur kan, sehingga di daerah buangannya, mereka tidak menghasut penduduk setempat untuk berontak melawan Portugal.

Selain para keluarga *deportados* itu, kelompok tuan tanah besar kedua adalah sejumlah raja, atau *liurai*, yang telah berjasa bagi penguasa Portugis. Contohnya adalah Raja Atsabe, Guilherme Maria Goncalves, salah seorang ketua pertama partai politik yang pro-integrasi, Apodeti. Selain kedua kelompok tuan tanah perorangan, ada juga dua institusi pemilik tanah luas. Yang pertama adalah perusahaan negara, SAPT (*Sociedade Agricola Patria e Trabalho*), yang menguasai ribuan hektar tanah di Timor Timur (Gterres, 1991: 56). Tanah yang dikuasai "BUMN" Portugal itu sebagian be-

sar berupa perkebunan kopi di sektor Barat (Liquica dan Ermera[11]) serta sejumlah kebun kelapa di sektor Timur (Baucau dan Lautem).

Namun institusi pemilik tanah luas terbesar di Timor Timur barangkali adalah Gereja Katolik. Kompleks-kompleks gereja paroki dan biara yang sebagian di antaranya dilengkapi dengan sekolah-sekolah berasrama (*collegios*), umumnya dikelilingi tanah sawah dan kebun yang luas, guna menghidupi komunitas-komunitas di paroki-paroki dan *collegios* itu. Di era Portugis, penggarapan sawah-sawah milik *collegio* di Maliana dilakukan oleh para siswa *collegio*, sebagai bagian dari pendidikan ketrampilan dan kedisiplinan mereka.

Melihat ketimpangan pola pemilikan tanah di akhir era penjajahan Portugis itu, mudah difahami kekhawatiran para tokoh UDT -- yang kebanyakan adalah anak *deportados* ditambah dengan enam orang *liurai* -- serta Apodeti terhadap bayang-bayang kemenangan Fretilin dalam pemilihan kepala-kepala desa di pedalaman Timor Timur dalam semester kedua 1974. Soalnya, Fretilin dalam platform kampanyenya jelas-jelas menekankan perlunya suatu *landreform* (lihat Taylor, 1991: 33). Landreform itu meliputi rencana redistribusi tanah-tanah luas tersebut, baik milik perorangan maupun milik 'BUMN' Portugis itu. Bahkan kelebihan tanah milik Gereja Katolik juga dinyatakan akan dibagi-bagikan kepada petani yang tak bertanah. Maka-nya, pimpinan Gereja Katolik di Dili pada awalnya juga bersikap anti-Fretilin.

Perlu dicatat terlebih dahulu, bahwa pola pembagian tanah yang timpang itu terutama berlaku di Timor Timur bagian Barat, yang dihuni oleh rumpun suku Kaladi, yang sudah jauh lebih dahulu dipasifikasi oleh para serdadu, para padri, dan kemudian orang-orang buangan dari Portugal. Alam kaki Pegunungan Ramelau di belahan Barat itu, juga lebih menguntungkan bagi perkebunan-perkebunan kopi milik para *mestico*, para liurai, dan SAPT. Sementara itu, di daerah bagian Timur, yang dihuni oleh rumpun suku Firaku, pengaruh Portugis masih relatif lebih tipis. Di sana, penguasaan tanah yang tak sesubur daerah Barat pada umumnya masih berada di tangan marga, tanpa banyak *fazenda* seperti di daerah Barat.

Sesudah "integrasi", sistem perkebunan besar itu tidak banyak berubah secara mendasar. Para tuan tanah besar yang pro-Indonesia dan tidak pergi mengungsi ke luar negeri, masih dapat mempertahankan *fazenda* mereka. Fazenda yang ditinggalkan oleh pemilik lamanya, beralih tangan ke segelintir orang Timor Timur dan orang Indonesia yang bekerja untuk kepentingan penguasa baru di Dili. Bekas perkebunan SAPT, diambil alih oleh sebuah perusahaan swasta, PT Salazar Coffee Plantations yang dikuasai oleh segelintir pedagang dan juga didukung oleh penguasa baru di Dili. Selain itu, kini telah muncul usaha-usaha penguasaan tanah luas baru, yang bergerak di luar perkebunan kopi. Misalnya, perusahaan penyulingan minyak kayu cendana, PT Scent Indonesia, yang didukung oleh konsesi hutan cendana di seluruh Tim-Tim (lihat Peta 2). Sementara itu, PT Marmer Timor Timur yang berbasis di Manatuto, memegang monopoli atas penambangan marmer di seluruh Tim-Tim (lihat Peta 3).

---

11) Perkebunan kopi di Ermera dirintis oleh SAPT di tahun 1899 (Taylor, 1991: 11).

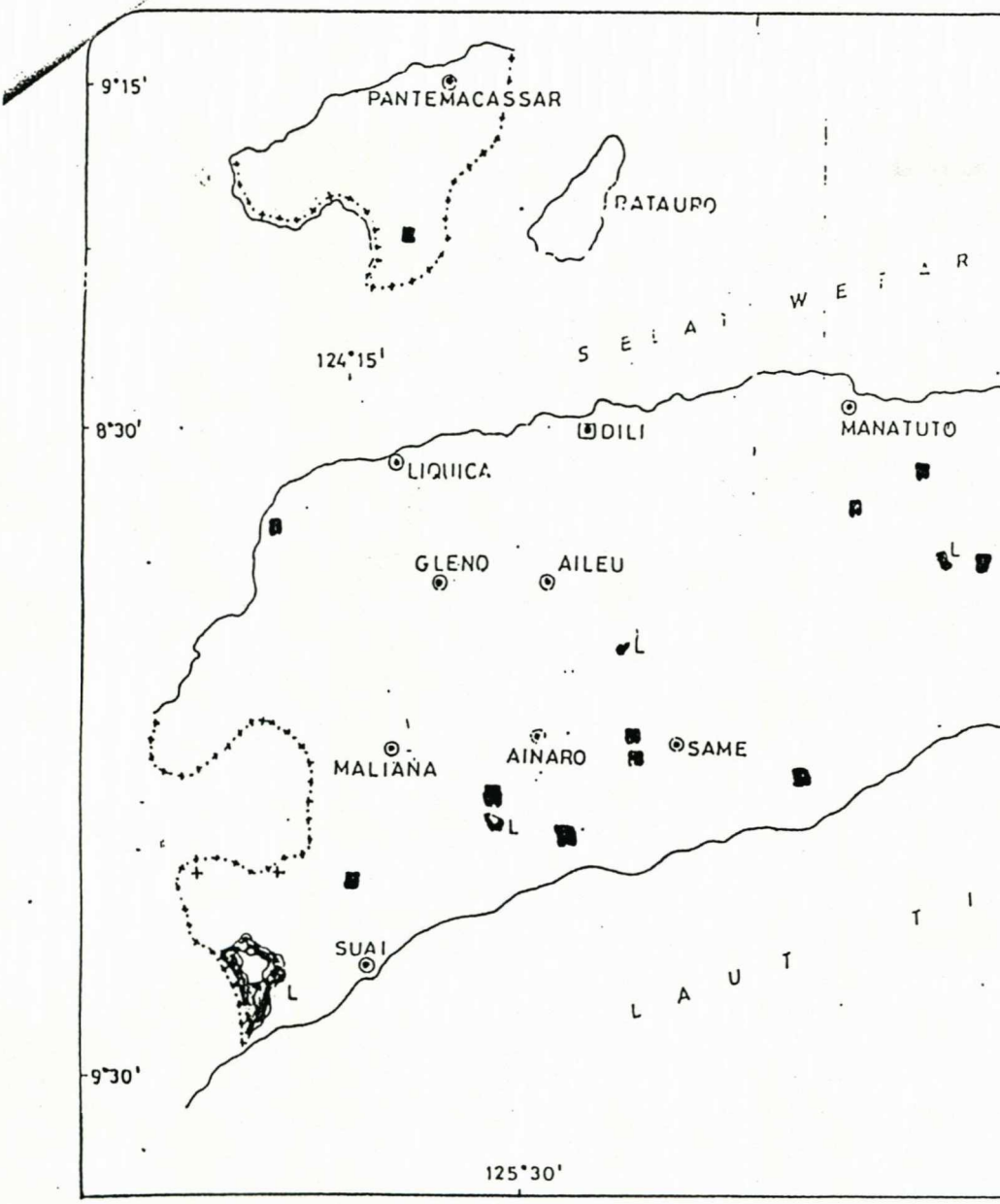
9°15'
PANTEMACASSAR
PATAURO
124°15'
SELAI WETAR
8°30'
DILI
MANATUTO
LIQUICA
GLENO
AILEU
MALIANA
AINARO
SAME
SUAI
LAUTI
9°30'
125°30'

Peta 2: Penyebaran Kayu Cendana di Timor Timur
(Sumber: Kanwil BPN Propinsi Timor Timur)

Memang di sana-sini ada usaha melakukan redistribusi tanah-tanah luas di desa-desa yang tadinya hanya dikuasai oleh satu dua keluarga *mestico*. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Proyek LPM UKSW di Desa Vatuvou di Kecamatan Maubara, Kabupaten Liquica, dengan dukungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Timor Timur. Namun secara menyeluruh, pemilikan tanah luas secara guntai oleh perusahaan-perusahaan besar, yang sesungguhnya bertentangan dengan teks dan semangat UUPA No. 5/1960 serta UU Landreform No. 56/ 1962, justru semakin menjadi-jadi di masa pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, perlu diantisipasi persoalan lingkungan pertanahan yang semakin meningkat, lengkap dengan konflik-konflik perdata dan pidana, di masa mendatang.

Berbicara tentang monopoli perkebunan kopi di tangan PT Salazar Coffee Plantations, minyak kayu cendana di tangan PT Scent Indonesia, dan marmer di tangan PT Marmer Timor Timur, perlu dikemukakan bahwa ketiga perusahaan itu tergabung dalam PT Batara Indra Group, yang memonopoli hampir seluruh perekonomian Timor Timur. Kelompok perusahaan ini berevolusi dari PT Denok Hernandes International yang didirikan oleh tiga perwira pimpinan Operasi Seroja -- Benny Murdani, Dading Kalbuadi, dan Sahala Rajagukguk -- dengan dukungan segelintir pengusaha keturunan Cina, untuk menambah biaya operasi militer di Timor Timur, dengan memonopoli pembelian dan ekspor kopi dari Timor Timur (Taylor, 1991: 125-127).

Kini, salah satu anak perusahaan PT Batara Indra Group, PT Watu Besi Raya, memborong sebagian besar pekerjaan teknik sipil di Timor Timur. Selain itu, kelompok perusahaan itu sudah juga merintis perkebunan tebu dan pabrik gula di Kabupaten Lautem, serta sebuah pelabuhan baru di Kom, juga di Lautem, yang kini terbengkalai setelah pelindung utama PT Batara Indra Group, Benny Murdani, dipensiunkan oleh Soeharto. Sebelumnya, Batara Indra Group juga telah berekspansi ke luar Timor Timur dengan membangun sebuah resort pariwisata, termasuk *casino*, di Pulau Christmas, sebuah teritori Australia di Samudera Hindia.

Nah, selain melangkahi berbagai ketentuan dan semangat UUPA dan UU Landreform, anak-anak perusahaan PT Batara Indra Group ini tampaknya juga terbebas dari ketentuan UU Lingkungan Hidup, khususnya PP AMDAL[12] Lalu, bagaimana dapat dijaga kelestarian hutan cendana yang produknya praktis dimonopoli oleh PT Scent Indonesia? Bagaimana dapat diminimalisasi dampak pertambangan marmer yang dimonopoli oleh PT Marmer Timor Timur? Bagaimana dapat diantisipasi dampak ekologis perkebunan tebu, pabrik gula, dan pelabuhan Kom yang dibangun kelompok perusahaan itu di Lautem? Bagaimana dapat diantisipasi dan diminimalisasi dampak ekologis dari jalan *bypass* baru yang saat ini sedang dibangun kelompok perusahaan itu di Manatuto?

---

12) Proyek-proyek pinjaman luar negeri untuk Timor Timur, juga terbebas dari kewajiban menjalankan AMDAL secara sungguh-sungguh. Misalnya proyek pemberantasan malaria melalui penyemprotan DDT secara besar-besaran, yang dibiayai dengan pinjaman US-AID di awal 1980-an, walaupun ketentuan AMDAL juga termasuk prosedur yang diwajibkan oleh USAID.

***

SEMENTARA penguasaan tanah berlebihan secara guntai semakin menjadi-jadi di Timor Timur, penguasaan tanah kecil (*small landholdings*) pun kian bergeser dari tangan petani-petani pribumi. Gejala ini, untunglah lebih bersifat terbatas di satu dua kabupaten saja, berkat terbatasnya proyek-proyek transmigrasi umum di Timor Timur (lihat Peta 4), yakni terpusat di Kabupaten Maliana dan Kovalima. Selain itu ada beberapa lokasi transmigrasi yang lebih kecil di Kabupaten Baucau dan Viqueque, atas prakarsai PGI dan Gereja Kristen Jawi Wetan (Taylor, 1991: 124). Namun untuk sementara, mari kita batasi sorotan kita pada Bobonaro dan Kovalima saja.

Lokasi-lokasi transmigrasi di kedua kabupaten itu punya beberapa kekhususan dibandingkan dengan proyek-proyek transmigrasi di Irian Jaya, yang beberapa tahun lalu mengundang reaksi internasional (lihat Aditjondro, 1986). Berbeda dengan proyek-proyek transmigrasi di Irian Jaya atau di Kalimantan, lokasi-lokasi transmigrasi di Bobonaro dan Kovalima tidak "diukir" dengan susah payah dari apa yang sebelumnya merupakan hutan primer, hutan sekunder, atau hutan savana dan rawa-rawa.

Malah sebaliknya. Lokasi-lokasi transmigrasi di Bobonaro dan Kovalima "disulap" dengan mudah dari apa yang sebelumnya sudah merupakan sawah-sawah penduduk asli. Di salah satu lokasi di Bobonaro yang termasuk Desa Memo, tanah sawah itu "diperoleh" dari penduduk asli tanpa membayar ganti rugi se-sen pun, menurut para petani pribumi yang saya wawancarai. Tanpa banyak kesulitan, para transmigran Bali -- yang di Timor Timur secara resmi selalu disebut "petani teladan" -- dengan cepat mereproduksi sawah, subak, dan pura mereka, sambil memperlebar jurang perbedaan pendapatan, budaya, dan agama mereka dengan penduduk setempat.

Ada lagi satu perbedaan lain antara proyek-proyek transmigrasi di Timor Timur dibandingkan dengan di Irian Jaya. Yakni: lokasi-lokasi transmigrasi di kabupaten Merauke dan Jayapura di Irian Jaya, tak begitu mudah menarik arus migrasi dari Papua Niugini. Sebaliknya, proyek-proyek transmigrasi di kabupaten Bobonaro dan Kovalima yang begitu cepat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sangat mudah menarik arus migran spontan dari Timor Barat, khususnya dari Kabupaten Belu. Selama menempuh perjalanan darat dari Maliana (ibukota Kab. Bobonaro) ke Suai (ibukota Kab. Kovalima), hampir setiap jam saya berpapasan dengan bustruk penuh penumpang dari Atambua (ibukota Kab. Belu). Dengan kemahiran mereka berbahasa Tetum (bahasa ibu mereka), dan dengan kesamaan agama mereka dengan mayoritas penduduk asli Timor Timur, para migran suku Belu dengan mudah akan meramaikan arus perebutan tanah di daerah perbatasan Timor Timur, yang sebagian sudah dikuasai oleh transmigran Bali dan Jawa.[13]

---

13) Di Desa Casabau (Kec. Tilomar, Kab. Kovalima), 4 tahun lalu dilaporkan bahwa 500 Ha tanah penduduk asli diserobot oleh transmigran Jawa di lokasi Salele (*Fakta*, 1 Mei 1989: 54). Menurut keterangan seorang informan, para transmigran itu pada mulanya mengaku Katolik, tapi setelah menetap di Salele mereka kembali ke Islam.

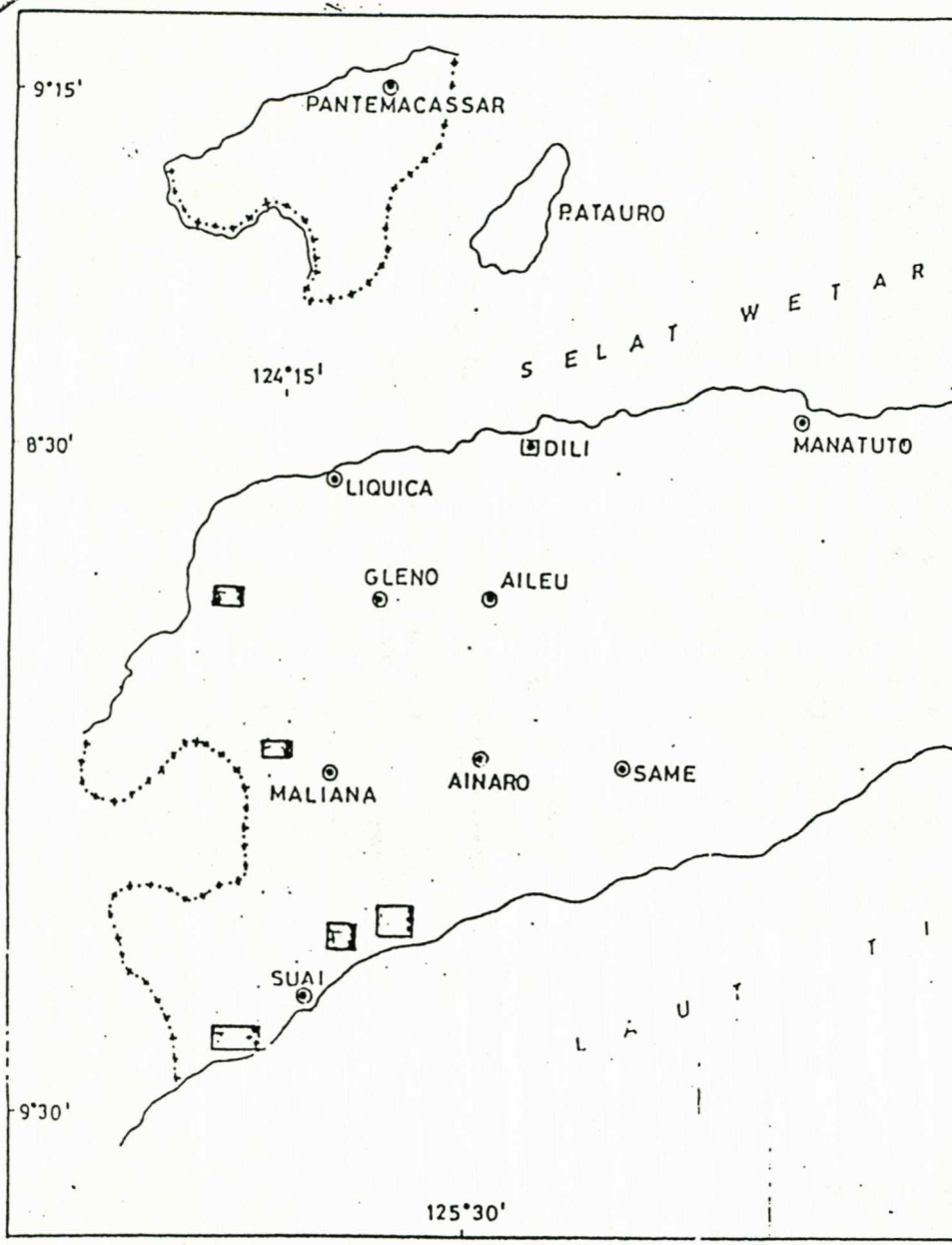
9°15'
PANTEMACASSAR
PATAURO
SELAT WETAR
124°15'
8°30'
DILI
MANATUTO
LIQUICA
GLENO
AILEU
MALIANA
AINARO
SAME
SUAI
LAUT
9°30'
125°30'

Peta 4: Penyebaran lokasi-lokasi transmigrasi di Timor Timur
(Sumber: Kanwil BPN Propinsi Timor Timur)

Lalu, ke mana para petani suku Tetum, Kemak, dan Bunak yang merupakan penduduk asli perbatasan Timor Timur itu harus menyingkir? Di kaki pegunungan Ramelau, tanah juga sudah semakin sempit, mengingat dataran-dataran tinggi di sana sudah dipadati dengan perkebunan kopi dan usaha para pedagang Bugis-Makassar yang mendominasi pasar-pasar sepanjang poros Utara-Selatan dari Dili sampai ke Same.

Khusus bagi para petani di dataran rendah sepanjang pesisir Kovalima, masih tersedia tantangan baru, yakni kegiatan-kegiatan ekonomi pendukung eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Celah Timor, yang akan kita bahas kemudian. Sebelumnya, ada satu masalah lingkungan lain yang perlu disoroti terlebih dahulu, yakni pola pemukiman kembali penduduk dalam desa binaan serta model rumah keluarga batih yang dibangun oleh batalyon-batalyon teritorial di Timor Timur.

***

MODEL rumah adat Lospalos, yang sejak zaman Portugis s/d zaman pemerintahan Indonesia di Timor Timur dianggap paling "mewakili" daerah itu, sesungguhnya hanya satu di antara tujuh pola besar arsitektur tradisional Timor Timur (lihat Peta 5 dan Skema 1). Menurut Cinatti, de Almeida dan Mendes (1987: 16-17), ketujuh pola itu adalah: (1) pola Bobonaro; (2) pola Maubisse; (3) pola Baucau; (4) pola Lautem; (5) pola Viqueque; (6) pola Suai; dan (7) pola Oe-cussi. Ketujuh pola itu mewakili tiga ekosistem atau topografi yang berbeda. Kedua pola pertama, Bobonaro dan Maubisse, mewakili pola-pola pemukiman di daerah pegunungan (*montanha*). Dua pola berikutnya, Baucau dan Lautem, mewakili pola-pola pemukiman di daerah dataran tinggi (*planalto*). Sedangkan ketiga pola yang terakhir -- Viqueque, Suai, dan Oe-cussi -- mewakili pola-pola pemukiman penduduk asli di daerah dataran rendah (*planiche*).

Ketujuh pola arsitektur tradisional itu berkembang sebagai hasil interaksi penduduk asli selama ratusan tahun dengan lingkungan mereka. Baik bahan bangunannya, konfigurasi kampung mereka, sampai dengan arsitektur masing-masing bangunan di kampung-kampung asli itu, telah disesuaikan dengan sistim kepercayaan, struktur sosial, maupun ekosistem di mana mereka bertani, berburu, dan mencari nafkah dengan cara-cara lain, sebagaimana diuraikan dengan terinci oleh Cinatti dkk dalam karya mereka (1987). Jadi bukan kebetulan bahwa di daerah yang luasnya "hanya" 18.898 Km2 itu (termasuk *enclave* Oe-cussi, Pulau Atauro, dan Pulau Jaco), "terhimpun" keragaman arsitektur tradisional yang begitu tinggi, di mana ada arsitektur Lospalos yang begitu tinggi seni ukirnya, seperti *tongkonan* Toraja di Sulawesi Selatan, maupun arsitektur Bobonaro dan Maubisse, yang mirip *silimo* di Lembah Balim, Irian Jaya (lihat Aditjondro, 1989: 12).

Kini, arsitektur tradisional Timor Timur itu pelan-pelan mulai tergerogoti oleh pemindahan penduduk pedalaman Timor Timur ke dalam desa-desa binaan yang tersebar di berbagai daerah (lihat Peta 6). Desa-desa binaan itu merupakan "warisan" dari program *resettlement* penduduk yang turun dari gunung yang dibarengi dengan

SINAIS	REGIÃO	PLANTAS E ALÇADOS	ALTITUDE
	BOBONARO	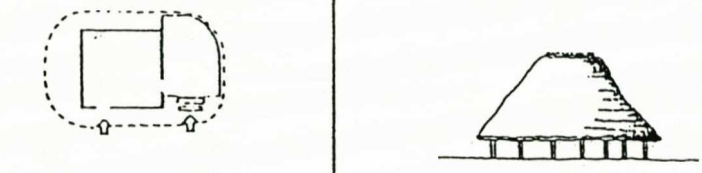	MONTANHA
	MAUBISSE	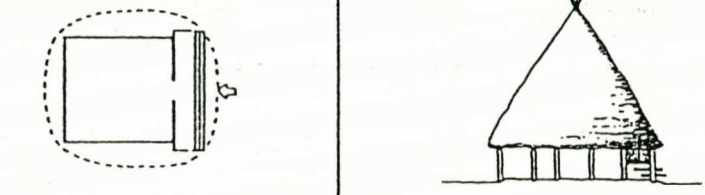	MONTANHA
	BAUCAU	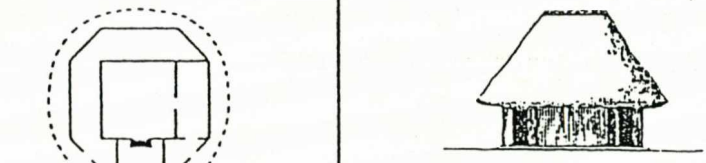	COLINAS PLANALTO
	LAUTEM	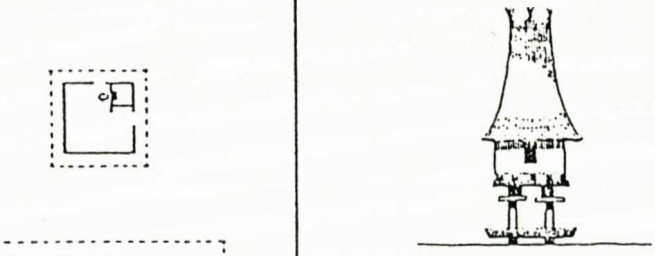	COLINAS PLANALTO
	VIQUEQUE	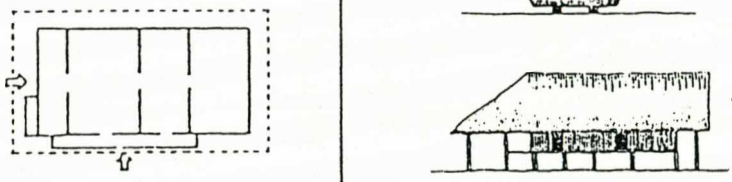	PLANÍCIE
	SUAI	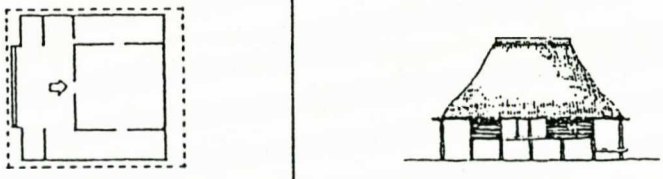	PLANÍCIE
	OCUSSI	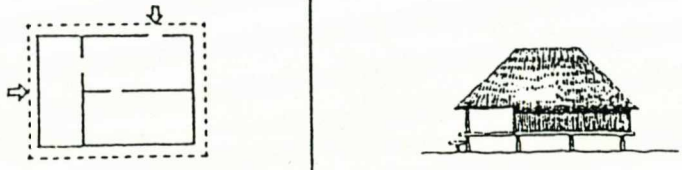	PLANÍCIE

Skema 1: Tujuh pola arsitektur tradisional Timor Timor yang utama
(Sumber: Cinatti, de Almeida, Mendes, 1987: 57

5: Penyebaran tujuh pola arsitektur tradisional Timor Timor yang utama
(Sumber: Cinatti, de Almeida, Mendes, 1987: 56)

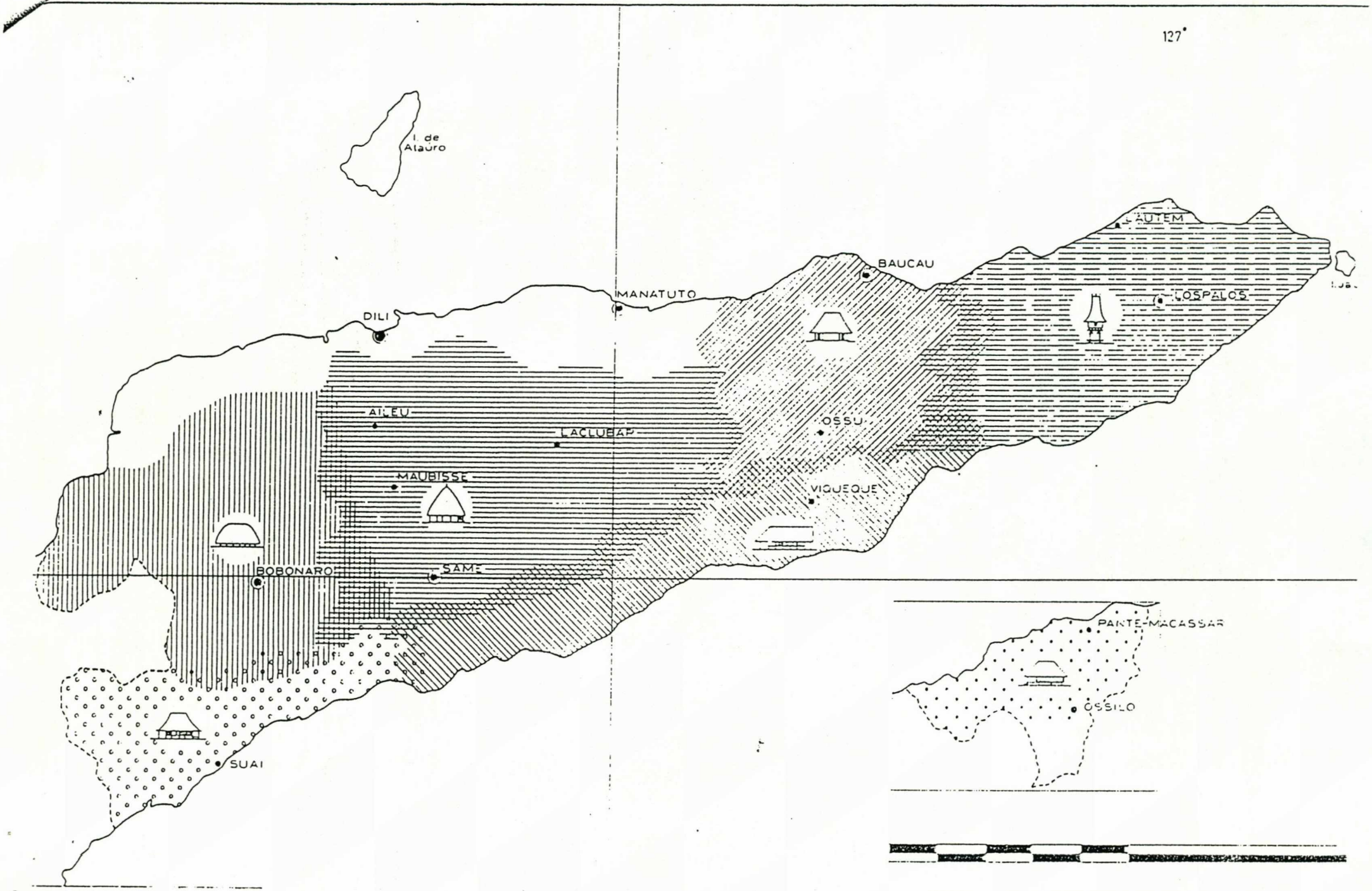

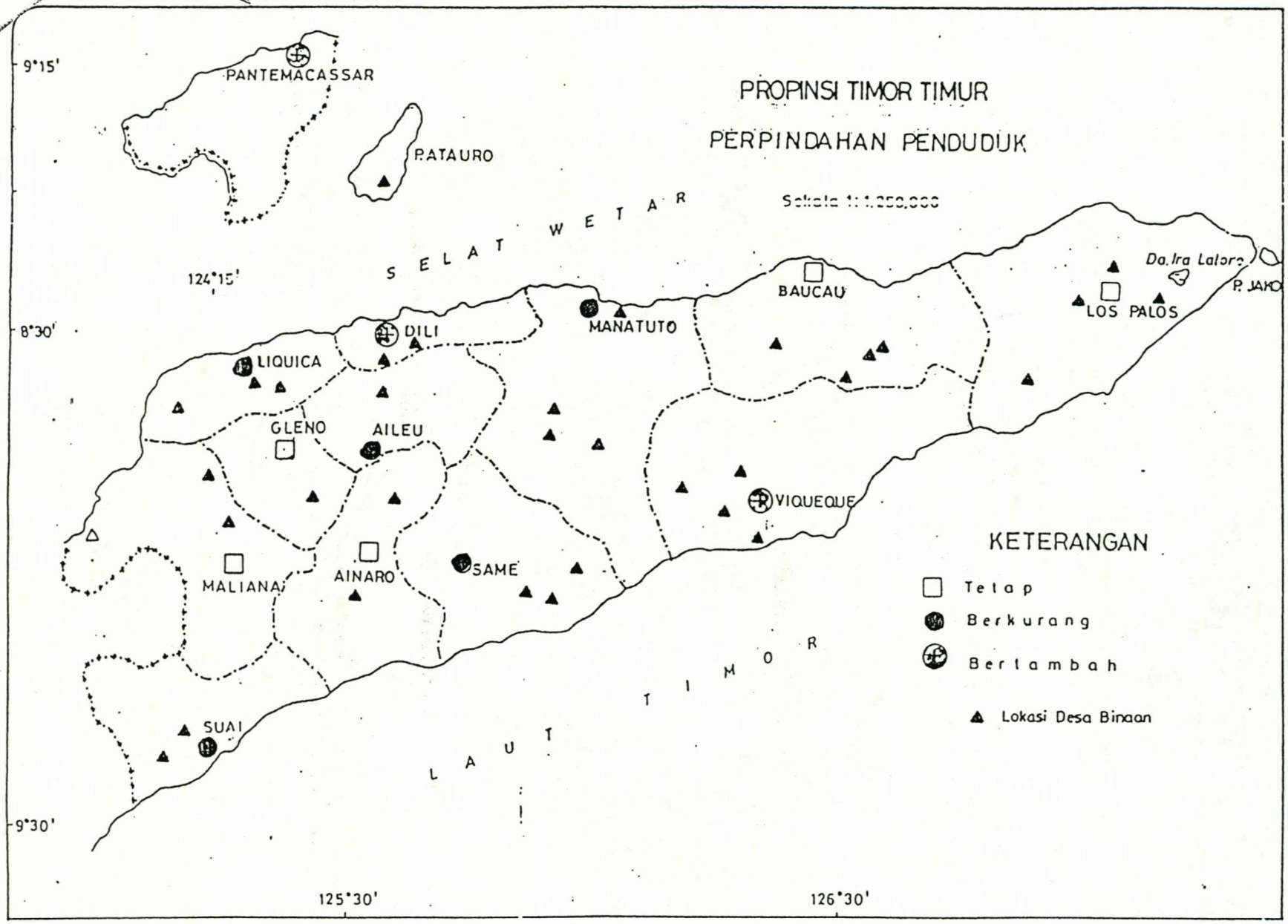

Peta 6: Perpindahan penduduk dan lokasi desa-desa binaan di Timor Timur
(Sumber: Kanwil BPN Propinsi Timor Timur)

pemukiman kembali gerilyawan-gerilyawan Fretilin dan Falintil yang menyerah atau tertangkap di akhir 1970-an. Arus pengungsian turun gunung itu ikut terpacu oleh pemboman secara intensif oleh skadron pesawat OV-10F TNI/AU dari tahun 1976 s/d 1979. Kampanye pemboman itu memang sangat efektif, karena dapat terbang rendah sampai ketinggian 100 - 200 meter, sambil melepaskan bom napalmnya yang menjadi hantu bagi para gerilyawan (*Angkasa*, Januari 1993: 41-42).

Selain karena tak sesuai dengan arsitektur tradisional setempat, desa-desa binaan itu tak punya daerah sekitar yang dapat mendukung kehidupan arus tambahan penduduk yang tiba-tiba melonjak. Itu sebabnya angka kematian penduduk di desa-desa binaan itu tergolong tinggi, yang digambarkan menyaingi kaliber tragedi Biafra (Taylor, 1991: 92-99).

Sesudah program *resettlement* penduduk yang turun gunung itu, "bantuan" untuk pembangunan rumah-rumah penduduk masih terus dijalankan. Yang ini merupakan bagian dari program bantuan batayon-batalyon teritorial, yang digalakkan di masa Panglima Kolakops Timor Timur, Brigjen Rudolf Warouw. Namun dalam program inipun faktor-faktor budaya penduduk asli, yang merupakan penyesuaian dengan ekosistem-ekosistem dan topografi lingkungan mereka yang berbeda-beda, tak diperhatikan. Seperti halnya baju seragam para serdadu yang membangunnya, semua rumah yang mereka bangun untuk rakyat Timor Timur juga seragam bentuknya. Soalnya, yang penting bukanlah mengembangkan semangat swadaya rakyat, melainkan membangun sebanyak mungkin rumah untuk sebanyak mungkin rakyat dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dan yang penting, semua rumah itu dibangun di tepi jalan raya, untuk memudahkan pemantauan penduduk oleh para petugas keamanan. Aspek *surveillance* ini tampaknya lebih diperhatikan ketimbang kemudahan penduduk untuk bepergian ke kebun dan hutan mereka.[14] Walhasil, di banyak tempat, hanya fasilitas air minum yang dibangun oleh batalyon-batalyon infanteri dalam rangka program 'pembinaan teritorial' itu yang betul-betul bermanfaat. Sementara rumah-rumah yang dibangun, banyak yang tak dihuni.

***

AKHIRNYA, sampailah kita pada masalah lingkungan yang kelima, yang masih bersifat potensial, yaitu: dampak pengeboran dan penyaluran minyak dan gas bumi dari Celah Timor. Usaha pengeboran pertama di lepas pantai Timor telah dimulai, Desember lalu, oleh perusahaan AS, USX Marathon Oil, yang ikut melibatkan modal Australia, Indonesia, Inggeris, Brazil dan Mesir. Selain perusahaan itu, sebelas perusahaan minyak lain sudah mengikuti jejak Marathon Oil, yakni Royal Dutch Shell (Be-

---

[14]) Di beberapa tempat, misalnya di Kabupaten Lautem dan Baucau, penduduk harus melapor dahulu ke pos tentara terdekat sebelum pergi ke kebun atau ke hutan, dan pulang dari tempat kerjanya juga harus melapor lagi. Ditambah dengan perubahan tata-letak kampung semula mendekati jalan raya, intervensi yang bersifat *security* ini dapat menimbulkan implikasi ekologis yang 'menguntungkan', misalnya mengurangi penebangan kayu cendana untuk kerajinan ukir-ukiran Lospalos yang terkenal itu. Tapi sebaliknya, intervensi ini juga dapat menyebabkan dampak ekologis yang merugikan, misalnya, mengurangi frekuensi penyiangan rumput (*weeding*) di kebun, sehingga mempercepat tumbuhnya alang-alang.

landa/Inggeris), Chevron (AS), BHP Petroleum (Australia), Woodside Petroleum (Australia) dan anak perusahaannya, Santos Ltd., Nippon Oil (Jepang), Philips Petroleum (AS), Sagas Co. (Australia), Petroz NL (Australia), Enterprise Oil PLC (Inggeris), dan Western Mining Co. Sebelas perusahaan minyak itu bersama-sama siap menancapkan 45 sumur eksplorasi pada areal seismik sepanjang 52.100 Km (*Publico*, 12 Desember 1991; *Cahaya Siang*, 3 Oktober 1992; *Kompas*, 6 November 1992).

Reaksi berbagai fihak sangat berbeda menghadapi "demam Timor Gap" itu. Portugal, yang masih diakui PBB sebagai administrator Timor Timur, telah menggugat pemerintah Indonesia dan Australia ke Mahkamah Internasional di Den Haag (Nairn, 1991). Di Australia sendiri, a/n CNRM (Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Maubere), Jose Manuel Ramos-Horta juga telah menggugat pemerintah Australia ke Mahkamah Agung Australia. Sementara itu, kalangan bisnis dan pemerintah di Australia dan Kupang (Indonesia), berlomba-lomba memperjuangkan daerah dan perusahaannya untuk menjadi *supply base* bagi kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi itu. Malam hari, dari kota Kupang orang dapat menyaksikan kelap-kelip landasan pengeboran minyak yang sedang naik dok di pelabuhan Tenau. Sementara siang hari, usaha pembelian tanah penduduk di daerah Bolok, sebelah barat Tenau, sudah berjalan dengan gencar. Soalnya, PemDa NTT memang aktif mempromosikan Bolok sebagai *supply base* pengeboran minyak dan gas bumi Celah Timor, sekaligus kawasan industri seluas 1.600 Ha (*Pos Kupang*, 3 Juni 1993).

Sementara itu, suasana di Suai, ibukota kabupaten Kovalima di Timor Timur masih tenang-tenang saja. Tapi di balik permukaan air yang tenang itu, kalangan pemerintah maupun masyarakat Timor Timur sendiri, tampaknya ikut mengantisipasi *boom* minyak dari Celah Timor. Tiga jembatan baru melintasi sungai-sungai kering menjelang kota Suai, seolah-olah bersiap-siap menghadapi peningkatan arus lalu-lintas alat-alat berat (atau transmigran, barangkali). Seorang imam pribumi yang saya wawancarai, mengkhawatirkan bahwa pengeboran minyak di lepas pantai juga akan memacu pengeboran di daratan pesisir selatan Timor Timur, yang juga kaya minyak (lihat Peta 3). "Di sini orang menggali sumur air pun seringkali ketemu minyak", katanya. Karena itu ia cemas, bahwa tanah milik penduduk asli, yang sudah banyak digerogoti oleh para transmigran dan migran spontan, akan lebih banyak lagi digerogoti untuk pengeboran minyak.

Boleh jadi, tanah di pesisir selatan Timor Timur tak akan dibor secara langsung, walaupun bor minyak peninggalan zaman Portu memang masih tertancap di Suai Loro. Namun seperti halnya di Timor Barat, berbagai kegiatan ekonomi penunjang usaha pertambangan minyak dan gas bumi itu, bisa saja muncul di kawasan pantai selatan itu. Malah sudah ada yang menghimbau agar Suai diberi porsi dalam kegiatan eksplorasi di Celah Timor, dengan memanfaatkan lapangan terbang Holbelis yang mampu didarati pesawat Transall C-160 dan Hercules C-130, sebagai batu loncatan ke kota Darwin, Australia (Wibowo, 1993).

Makanya, perlu ada usaha mengantisipasi dampak eksplorasi minyak dan gas bumi di Celah Timor itu terhadap lingkungan pesisir selatan Timor Timor, agar pen-

duduk asli tidak sekali lagi menjadi pecundang. Bahkan selama mereka masih dianggap warganegara Indonesia, hak veto mereka perlu dijamin untuk menolak semua usaha ekonomi yang diperkirakan dapat menimbulkan kerugian atau gangguan bagi mereka, sesuai dengan ketentuan Butir XX UU Gangguan 1926 (lihat Salindeho, 1989: 43-47).

Eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas pantai Timor juga dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi para nelayan dan pengguna jasa angkutan laut. Kebetulan, seperti halnya di Timor Barat, perairan selatan Timor Timur yang dijuluki "laut laki-laki" (*Mar de Homem*) karena ombaknya yang lebih ganas dibandingkan dengan perairan Selat Ombai di Utara (yang dijuluki "laut perempuan" = *Mar de Mulher*), tak begitu menarik minat para nelayan asli Timor Timur. Tapi betapapun juga, kecelakaan tanker atau tumpahnya minyak mentah dari tanker-tanker yang bakal melintas di Laut Timor, seperti yang sudah merupakan kejadian rutin di Selat Malaka, perlu diantisipasi dampaknya oleh para aktivis lingkungan di Timor Timur maupun di Timor Barat.

***

Salatiga, 4 Agustus 1993.

Daftar Pustaka:

Aditjondro, George J., 1986. "Transmigration in Irian Jaya: Issues, Targets and Alternative Approaches," *Prisma*, pp. 67-82.

----------, 1989. "The Cultures of the Irian Jayan Indigenous Peoples." Makalah kuliah Etnologi untuk PIBBI di UKSW, Desember, Salatiga.

Beding, Marcel, 1980. "Sekarang Mulai Tampak Akibatnya: Bahan Kimia Beracun dalam Perang Vietnam", *Kompas*, 1 April.

Bet, 1993. "Dwi Windu OV-10F TNI-AU: Kuda Liar Yang Banyak Makan Asam Garam "Perang" Di Indonesia", *Angkasa*, 3 (4), Januari, hal. 39-42.

Cinatti, Ruy, Lepoldo de Almeida, Sousa Mendes, 1987. Arquitectura Timorense. Lisboa: Instituto de Investigacao Cientifica Tropical, Museu de Etnologia.

Dirdja, Alex, 1979. "Timor Timur: Beberapa Pengalaman dan Pemikiran", *Inter-Nos*, 23 (2), April-Juni, hal. 22-33.

Fanon, Frantz, 1967. Black Skin, White Masks. New York: Grove Press.

Galstone, Arthur W., 1971. "Warfare with Herbicides in Vietnam," dalam John Harte and Robert H. Socolow (eds). Patient Earth. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., hal. 9-150.

Guterres, Francisco da Costa, 1991. Profil Konversi di Timor Timur : Case Study Di Desa Santa Cruz. Skripsi Sarjana Hukum pada FH-UKSW.

Human Rights in East Timor and the Question of the Use of U.S. Equipment by the Indonesian Armed Forces: Hearing before the Subcommittees on International Organizations and on Asian and Pacific Affairs of the Committee on International Relations. Washington, DC: House of Representatives, Ninety-fifth Congress, First Session, March 23, 1977/U.S. Government Printing Office.

CLIPPING " CINTA DAMAI "

Sumber : Pos Kupang
Hari / tgl : Sabtu, 3-7-93.
Hal / Kol : 5/4-6.
Bidang : Tanah.

Tak manusiawi, rahasiakan eksploitasi Celah Timor

Kupang, PK

"Pemerintah daerah berkewajiban mengumumkan secara detail seluruh denah eksploitasi Celah Timor (*Timor gap*) kepada masyarakat. Merahasiakan perincian eksploitasinya berarti melanggar Undang-undang Gangguan dan Peraturan Pemerintah tentang Amdal. Itu tindakan ilegal dan tidak manusiawi, karena akan mengorbankan masyarakat banyak. Sikap itu akan menciptakan dan mendidik masyarakat untuk melanggar hukum."

Demikian George J Aditjondro, PhD, mantan Presidium Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), saat ditemui di Pusdiklat Yayasan Alfa Omega Tarus, Kupang, Rabu (1/7) lalu.

Masyarakat, khususnya petani dan nelayan, harus diberitahu lewat media masa atau papan-papan pengumuman agar mereka dapat mengantisipasi efek negatifnya. "Tanpa rincian denah eksploitasi Celah Timor, masayarakat petani dan nelayan yang akan terkena akibatnya tidak bisa berjuang mempertahankan haknya secara adil", ujar doktor lulusan *Cornell University*, Amerika serikat, yang juga dosen Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Kecenderungan merahasiakan proyek besar seperti eksploitasi Celah Timor, umumnya untuk menjaga terjadi spekulan-spekulan dibidang penjualan tanah. Ada ketakutan kalau perincian proyeknya diumumkan, maka rakyat akan beramai-ramai menjual tanahnya yang terkena proyek dengan harga yang mahal, dan anggaran proyek yang disiapkan untuk itu tidak mencukupi. Malah sangat jahat apabila kerahasiaan itu dijaga karena orang dalam (pejabat setempat, red) ada 'bermain' dengan para spekulan penjual tanah," tandas pecinta lingkungan hidup itu.

Merahasiakan proyek demi menjaga munculnya para spekulan tanah bukanlah alasan yang tepat, sebab dampaknya jauh lebih besar dari sekedar jual beli tanah. "Hal ini mulai terlihat ketika tahap eksplorasi dilaksanakan, dimana akan banyak sumur bor yang digali sehingga wilayah yang diamankan akan lebih luas dari wilayah eksploitasi. Akibatnya akan mengganggu dan membahayakan pengguna laut seperti para nelayan, transportasi, dan rekreasi. Kalau masyarakat diberitahu tentu mereka akan mengantispasinya efek-efek negatifnya. Kemudian pada tahap eksploitasi, dimana sumur-sumur permanen dipasang pipa-pipa ke darat ke tempat yang paling dekat dengan dermaga, tentu daerah radius 10 Km akan diamankan. Karena itu para petani dan nelayan harus diberitahu, sehingga bukan pada saat terakhir baru mereka digusur seenaknya", demikian Aditjondro sambil memberi tanda awas bahwa kalau hal ini yang terjadi tentu akan mengakibatkan gejolak dan keresahan dari masyarakat.

Menurut Aditjondro kalau benar Kolbano mau dijadikan dermaga transportasi bahan galian minyak yang diangkut kapal tanker, pemerintah sudah harus memperhitungkan kemungkinan pencemaran laut. Petani dan nelayan perlu disiapkan lahan pekerjaan yang lebih baik. Yang sering terjadi, menurut Aditjondro, pemerintah hanya menyebutkan hal positifnya saja. Bahwa proyek ini merupakan kebanggaan daerah, tetapi kurang dipikirkan dampak negatifnya bagi masyarakat. (mes)